



- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
    - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
    - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IPB.
  2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IPB.

## PENDAHULUAN

### Latar Belakang

Komunikasi didalam beberapa literatur sering digambarkan sebagai sebuah peristiwa, aktivitas dan juga proses. Komunikasi memiliki peranan penting dalam kehidupan manusia, tanpa komunikasi semua tidak akan berjalan dengan lancar, karena penyampaian gagasan, ide, emosi, dan lain-lain tersampaikan melalui proses yang dinamakan komunikasi ini. Komunikasi memiliki tiga buah komponen vital yang menjadi syarat terjadinya proses komunikasi, salah satunya adalah pembicara (komunikator), pendengar (komunikan) dan pesan yang disampaikan. Ketiga komponen ini adalah dasar yang diperlukan agar proses komunikasi itu terjadi sesuai dengan model yang dikemukakan oleh Aristoteles (Mulyana, 2016:145). Proses komunikasi bukan berarti hanya bisa sesederhana proses penyampaian pesan saja, ada komponen lain seperti *encoding*, *decoding* belum lagi *noise* atau hambatan. Komponen komunikator dalam praktiknya di kehidupan nyata dikenal sebagai sebuah individu, lembaga atau institusi yang mempunyai tujuan menyampaikan pesan berupa informasi. Target pesan yang disampaikan dari komunikator adalah komunikan dan dalam hal ini diasumsikan sebagai masyarakat umum atau publik.

Kementerian Luar Negeri (Kemlu) merupakan instansi pemerintah yang menjadi ujung tombak hubungan dan diplomasi Indonesia dengan negara maupun organisasi internasional. Kemlu mempunyai tujuan pokok untuk menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang politik dan hubungan luar negeri yang bertujuan untuk membantu presiden dalam menyelenggarakan pemerintahan negara. Kegiatan ini melibatkan proses komunikasi internasional yang mempunyai relasi yang kuat dengan politik luar negeri dan salah satu hal yang familiar mengenai komunikasi internasional yaitu diplomasi. Andrianti (2015:4) mendefinisikan diplomasi sebagai suatu pekerjaan komunikasi yang nyata dalam hubungan internasional. Diplomasi terus berkembang seiring dengan zaman dan mempunyai banyak jenis termasuk diplomasi publik. Diplomasi publik adalah sebuah jenis negosiasi dan kerja sama dalam hubungan internasional untuk meningkatkan citra positif negara dengan melibatkan lembaga-lembaga maupun individu yang tidak berada dalam struktur pemerintahan. Masyarakat atau publik akan banyak terlibat dengan jenis diplomasi ini dan otomatis terinformasikan dengan sendirinya tentang isu internasional yang sedang Indonesia hadapi sebagai capaian dari diplomasi publik, khususnya dalam menunjang hubungan diplomasi antar satu negara dengan negara lainnya.

Dunia yang semakin maju mengakibatkan pesatnya perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi secara global. Bertumbuhnya interaksi dan interdependensi antarnegara dan antarbangsa membuat hubungan internasional yang diwarnai dengan kerja sama dalam berbagai bidang terus meningkat. Persoalan ini mengakibatkan perlu dibentuknya satuan kerja yang berada di lingkungan Kementerian Luar Negeri untuk menjawab tantangan globalisasi pada proses hubungan luar negeri Indonesia, terutama dalam menyebarkan isu-isu internasional. Isu-isu tersebut diwarnai dengan topik yang tidak jauh dari permasalahan ekonomi, keamanan, perdamaian, kesehatan dan lainnya. Direktorat Jenderal Informasi dan Diplomasi Publik (Ditjen IDP) adalah satuan kerja yang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IPB.
2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IPB.

ditugaskan untuk menjawab persoalan diatas. Tugas yang dimiliki oleh Ditjen IDP adalah menyelenggaraan kebijakan di bidang perumusan pengelolaan dan pelaksanaan informasi serta penyelenggaraan diplomasi publik, keamanan diplomatik dan kerja sama teknik. Direktorat Jenderal Informasi dan Diplomasi Publik memiliki empat direktorat yaitu Direktorat Informasi dan Media, Direktorat Diplomasi Publik, Direktorat Keamanan Diplomatik dan, Direktorat Kerja sama Teknik yang keempatnya melakukan kegiatan diplomasi publik secara intensif.

Diplomasi publik dilakukan dengan cara mendiseminasikan informasi tentang isu dan kegiatan internasional maupun dalam negeri yang berkaitan langsung dengan Kementerian Luar Negeri. Diseminasi menurut Saleh *et al.* (2018:14) adalah “proses penyebaran inovasi yang direncanakan, diarahkan, dan dikelola untuk mengurangi ketidakpastian”. Sementara informasi secara etimologis adalah kata benda yang dibentuk dari kata kerja “untuk menginformasikan”, banyak literatur yang mengemukakan pendapat mengenai definisi dari kata informasi namun, definisi yang paling mendekati substansi yang dibahas pada laporan ini adalah Informasi yaitu pesan yang mengandung kebaruan menurut Moles (1994) dalam Saleh *et al.* (2018:8). Peran informasi juga dinilai sangat penting dengan seiring gesitnya pergerakan globalisasi dan ini dapat mempengaruhi iklim hubungan internasional antar negara.

Peraturan Menteri Luar Negeri tentang Organisasi dan Tata Kerja secara jelas menerangkan bahwa Direktorat Informasi dan Media mempunyai tugas melaksanakan kegiatan yang menjadi program kerja Direktorat Jenderal Informasi dan Diplomasi Publik di bidang informasi dan media mengenai berita, multimedia, data, pelayanan media, audio visual dalam memantapkan citra Indonesia dan membentuk opini publik yang positif bagi kepentingan nasional Indonesia di luar negeri. Direktorat Informasi dan Media dalam proses kerjanya memiliki fungsi kehumasan karena pada dasar konsep kerja humas terdiri dari manajemen dan teknis. Direktorat Informasi dan Media dalam hal manajemen membantu Kemlu untuk mengidentifikasi dan mendukung proses pengambilan keputusan serta manajemen krisis sementara dalam hal teknis Direktorat Informasi dan Media melakukan hal seperti pengelolaan portal, peliputan kegiatan hubungan luar negeri dan Kementerian, *media relation* dan pelayanan informasi publik. Aktivitas tersebut dilaksanakan agar tercipta masyarakat Indonesia yang sadar akan isu internasional.

Kementerian Luar Negeri dituntut untuk membangun opini publik yang positif mengenai Indonesia melalui kegiatan diplomasi publik dibantu oleh Direktorat Informasi dan Media. Pembangunan opini publik yang positif bagi Indonesia dilakukan dengan menggunakan strategi yang efektif demi melaksanakan proses diseminasi informasi secara aktual, cepat, akurat, dan berkesinambungan. Penyebaran atau diseminasi dilakukan kepada seluruh warga negara Indonesia maupun asing melalui berbagai cara dan jenis media komunikasi. Penerapannya seperti mendiseminasikan informasi tentang isu internasional yang telah dilakukan, manfaat isu internasional bagi masyarakat dan peran yang bisa dilakukan masyarakat sehingga masyarakat Indonesia dapat mengikuti dan juga terlibat dengan isu yang sedang terjadi demi memenuhi tuntutan globalisasi dan meningkatkan taraf kesejahteraan hidup. Pada hakikatnya negara yang berdaulat adalah negara yang dapat menunjukkan citra positif dan perannya di kawasan dan



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:  
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.  
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IPB.

2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IPB.

global bagi seluruh level masyarakat, bukan hanya kekuasaan dan otoritas politik yang diperlihatkan.

### **Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang di atas, maka terdapat beberapa rumusan masalah yang akan dibahas dalam penulisan Laporan Akhir ini adalah:

1. Kegiatan apa saja yang dilakukan Direktorat Informasi dan Media Kementerian Luar Negeri dalam upaya meningkatkan kesadaran publik terhadap isu internasional?
2. Bagaimana cara Direktorat Informasi dan Media di Kementerian Luar Negeri RI dalam proses diseminasi isu internasional kepada publik ?

### **Tujuan**

Diseminasi Informasi tentang isu internasional sangatlah penting untuk memastikan bahwa masyarakat Indonesia tetap mengikuti perkembangan peran Indonesia di panggung internasional, dalam hal ini laporan akhir ini menjelaskan bagaimana proses Direktorat Informasi dan Media melakukan diseminasi isu internasional kepada publik sebagai berikut:

1. Menjelaskan kegiatan yang dilakukan Direktorat Informasi dan Media Kemlu dalam upaya meningkatkan kesadaran publik terhadap isu internasional.
2. Menjelaskan proses Direktorat Informasi dan Media di Kementerian Luar Negeri RI dalam proses diseminasi isu internasional kepada publik.

### **METODE**

#### **Lokasi dan Waktu**

Lokasi pengumpulan data dilakukan saat penulis melaksanakan praktik kerja lapangan di Direktorat Informasi dan Media Kementerian Luar Negeri yang terletak di Gedung Kementerian Luar Negeri, Pejambon, Jakarta Pusat. Data yang dikumpulkan berdasarkan pada pengalaman dan observasi selama magang di Kementerian Luar Negeri selama dua bulan dengan waktu kerja lima hari dalam seminggu terhitung mulai tanggal 3 Februari sampai dengan 3 April 2020 dengan jam kerja pada hari Senin-Kamis pukul 08:00 - 16:30 dan khusus hari Jum'at pukul 08:00-17:00.

#### **Data dan Instrumen**

Demi menunjang hasil pembahasan yang akurat, data yang digunakan untuk menunjang penyelesaian Laporan Akhir ini berupa data primer dan data sekunder.

1. Data primer merupakan data yang didapat secara langsung dari observasi selama melaksanakan praktik kerja lapangan di Direktorat Informasi dan Media Kementerian Luar Negeri, data – data internal Kementerian Luar Negeri serta hasil wawancara dengan narasumber.
2. Data sekunder merupakan data yang diperoleh secara tidak langsung dari narasumbernya. Data ini biasanya didapatkan melalui sumber seperti situs resmi Kementerian Luar Negeri, buku-buku yang kredibel dan berhubungan